

**UNIT MANAJEMEN HUTAN TANAMAN RAKYAT BERBASIS
KELOMPOK KERJA DALAM KELOMPOK TANI HUTAN**

*(Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Bukit Hijau
di Desa Cenrana Kecamatan Camba Kabupaten Maros)*

**THE MANAGEMENT UNITS OF THE PEOPLE'S PLANTED
FOREST BASED ON THE WORKING GROUP
IN THE FOREST FARMING GROUP**

*(a Case Study of the Forest Farming Group in Bukit Hijau,
Cenrana Village, Camba Sub-District, Maros Regency)*

SUPRIADY SALLE



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASAR
2013**

**UNIT MANAJEMEN HUTAN TANAMAN RAKYAT BERBASIS
KELOMPOK KERJA DALAM KELOMPOK TANI HUTAN**

***(Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Bukit Hijau
di Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros)***

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

SUPRIADY SALLE

kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASAR**

2013

**UNIT MANAJEMEN HUTAN TANAMAN RAKYAT BERBASIS
KELOMPOK KERJA DALAM KELOMPOK TANI HUTAN**

***(Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Bukit Hijau
di Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros)***

Disusun dan diajukan oleh

SUPRIADY SALLE

Nomor Pokok P2700210504

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 10 Juli 2013
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat,

Prof. Dr. Ir. Muh. Dassir, M.Si
Ketua

Ketua Program Studi
Ilmu Kehutanan,

Dr. Ir. H. Mas'ud Junus, M.Sc
Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kehutanan,

Prof. Dr. Ir. Djamal Sanusi

Prof. Dr. Ir. Mursalim, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Supriady Salle
Nomor Pokok : P2700210504
Program studi : Ilmu Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: Unit Manajemen Hutan Tanaman Rakyat Berbasis Kelompok Kerja Dalam Kelompok Tani Hutan (*Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Bukit Hijau di Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros*) merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Juli 2013

Yang menyatakan

Supriady Salle

ABSTRAK

SUPRIADY SALLE. *Unit Manajemen Hutan Tanaman Rakyat Berbasis Kelompok Kerja dalam Kelompok Tani Hutan (Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Bukit Hijau di Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros)* (dibimbing oleh Muhammad Dassir dan Mas'ud Junus).

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) mekanisme kerja kelompok kerja HTR pada KTH Bukit Hijau, dan (2) bentuk pengelolaan HTR oleh kelompok kerja pada unit manajemen HTR yang dapat diterapkan di lokasi KTH Bukit Hijau.

Penelitian ini dilaksanakan di KTH Bukit Hijau Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Data dikumpulkan melalui diskusi kelompok berfokus, wawancara, dan survey lapangan. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan unit manajemen berbasis kelompok kerja dan sistem pengaturan hasil. Adapun analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui kelayakan finansial pengelolaan HTR dengan kriteria layak secara finansial jika $NPDP < HTB$, $NRER > 1$, $NPV > 0$, $B/C > 1$ dan $IRR > i$. Analisis spasial digunakan untuk menentukan areal yang tidak produktif, pembagian hak kelola, pembentukan unit manajemen HTR, dan pembagian petak.

Dari hasil analisis finansial budidaya sengon dan budidaya kacang tanah, pembangunan HTR melalui unit manajemen HTR berbasis kelompok kerja dalam KTH Bukit Hijau menggunakan pengaturan hasil berdasarkan luas, layak untuk dilaksanakan karena bersifat padat karya yang melibatkan masyarakat yang tidak memiliki lahan, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pemilik hak kelola dan masyarakat yang terlibat dalam kelompok kerja. Hal ini dapat dilihat dari analisis finansial dengan hasil: (a) NPDP lebih kecil dari HTB; (b) NRER bernilai positif; (c) NPV HTR bernilai positif; (d) B/C lebih dari satu, dan (e) IRR lebih tinggi dari tingkat suku bunga diskonto yang digunakan (suku bunga BLU P2H, 7%/tahun).

Kata kunci : *unit manajemen HTR , kelompok kerja*

ABSTRACT

SUPRIADY SALLE. *The Management Units of the People's Planted Forests (HTR) Based on the Working Group in the Forest Farming Group (KTH): a Case Study of the Forest Farming Group in Bukit Hijau, Cenrana Village, Camba Sub-District, Maros Regency* (Supervised by **Muhammad Dassir and Mas'ud Junus**)

This research aimed to find out (1) the working mechanism the working groups of HTR in KTH of Bukit Hijau; and (2) the management forms of HTR by the working groups in each management unit of HTR, which could be applied in Bukit Hijau KTH.

The research was conducted in Bukit Hijau KTH, Cenrana Village, Camba Sub-District, Maros Regency. The data were collected through focused group discussions, interviews, and field surveys. The analysis of the data used the qualitative and quantitative methods. The qualitative analysis was carried out in order to explain the group-based management units and yield-sharing system; while the quantitative analysis was carried out in order to find out the financial feasibility of the HTR management: it was considered financially feasible if the $NPDP < HTB$, $NRER > 1$, $NPV > 0$, $BCR > 1$, and $IRR > i$. Finally, the spatial analysis was carried out in order to determine the unproductive areas, the division of the management rights, the formation of the HTR management units, and the division of the compartments.

The financial analysis of the cultivation of the *Albizia sp* and the peanuts, and the development of HTR through the management units of the working-group-based HTR in Bukit Hijau KTH had shown feasible results because those labor-intensive activities involved landless community members, provided them with job opportunities, increased the incomes and improved the prosperities of those management right owners and of those who were involved in the working groups. All these could be seen in the results of the financial analysis: (a) the NPDP was smaller than HTB, (b) the value of NRER was positive, (c) the value of NPV HTR was positive, (d) B/C was greater than 1, and (e) IRR was higher than the current discount interest rate (the interest rate of BLU P2H was 7%/year).

Keywords: *HTR management unit, working unit.*

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis haturkan bagi Allah SWT atas segala rahmat, dan karunia-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Unit manajemen Hutan Tanaman Rakyat Berbasis Kelompok Kerja Dalam Kelompok Tani Hutan (*Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Bukit Hijau di Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros*) berhasil diselesaikan. Dalam tesis ini, penulis bermaksud menyampaikan bentuk pengelolaan hutan tanaman rakyat berbasis kelompok kerja agar dapat diterapkan dalam percepatan pembangunan hutan tanaman rakyat.

Pada kesempatan di awal bulan Ramadhan 1434 H yang penuh berkah, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M.Si. sebagai Ketua Komisi Penasehat dan Dr. Ir. H. Mas’ud Junus, M.Sc. sebagai Anggota Komisi Penasehat yang telah membimbing, mengarahkan, memberi semangat, dan meluangkan waktu kepada penulis hingga penulisan tesis ini bisa diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis, Amin.
2. Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc., Dr. Ir. Beta Putranto, M.Sc., dan Prof. Dr. Ir. Iswara Gautama, M.Si. sebagai Komisi Penguji yang telah banyak memberikan masukan berupa saran, perbaikan dan arahan

3. dalam rangka perbaikan hasil penelitian sampai dengan penulisan tesis ini bisa diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis, Amin.
4. Prof. Dr. Ir. Djamal Sanusi sebagai Ketua Program Studi Ilmu Kehutanan, Ibu Ruth Eppi Lobo, S.Sos. dan staf di Fakultas Kehutanan yang selalu membantu penulis menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana.
5. Kedua orang tuaku Ibunda Alm. Hj. R. Sumiaty dan Ayahanda Alm. Nuhung Paggo Dg. Salle dan terima kasih atas segala kasih sayangmu dan doamu, doaku selalu menyertaimu, Amin.
6. Teristimewa untuk istriku yang tercinta: Yulianti, serta jagoan kecilku: Muhammad Bintang Yudy Prawira dan Lingga Mahardika Rimbawan, terima kasih atas doa, dorongan semangat, pengorbanan waktu, dan kesabarannya yang terus diberikan kepada penulis.
7. Dekan Fakultas Kehutanan UNHAS, beserta jajarannya terima kasih atas dukungan moril yang sangat berharga bagi penulis.
8. Bapak Supriatna, S.Hut. (Kepala BP2HP Wilayah XV Makassar) dan Ibunda Ir. Siti Aminah, MM. (Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi BP2HP Wilayah XV Makassar), terima kasih atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan tesis ini.
9. Teman-teman mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kehutanan, adik-adik mahasiswa S1 Kehutanan yang membantu proses penelitian di Dusun

10. Holiang dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Makassar, Juli 2013

Supriady Salle

© Hak cipta milik UNHAS tahun 2013
Hak cipta dilindungi undang-undang

1. *Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.*
 - a. *Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.*
 - b. *Pengutipan yang wajar tidak merugikan kepentingan UNHAS.*
2. *Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin UNHAS*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
PRAKATA	
DAFTAR ISI	i
DAFTARTABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Teori dan Konsep	5
1. Defenisi Hutan Tanaman Rakyat	5
2. Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat	6
3. Pengaturan Hasil Hutan	10
4. Pengelolaan Hutan	14
5. Pengetahuan Sistem Hutan Tanaman Rakyat	17
6. Batas Kawasan Hutan	18

7. Sistem Informasi Geografis (SIG)	18
8. Jenis-Jenis Tanah Menurut Sistem Pusat Penelitian Tanah	22
9. Kelompok Tani Hutan	26
10. Kelompok Kerja	29
11. Sistem Tenur Pada Pemanfaatan Kawasan Hutan	31
12. Analisis Biaya dan Manfaat	33
B. Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
B. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data	39
1. Wawancara	40
2. Focus Group Discussion	41
3. Survey	42
C. Teknik Analisis Data	44
1. Analisis Deskriptif Kualitatif	44
2. Analisis Kuantitatif	45
3. Analisis Spasial	47
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI CALON AREAL	
IUPHHK-HTR KTH BUKIT HIJAU	51
A. Kondisi Biofisik	51
1. Letak Geografis	51
2. Kawasan Hutan	51
3. Penutupan Lahan	52
4. Ketinggian dan Kelerengan	53
B. Kondisi Sosial Ekonomi	53
1. Letak Administrasi dan Luas Areal	53
2. Keadaan Penduduk	53
3. Aksesibilitas Wilayah	54

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Karakteristik Sosial Ekonomi Petani KTH Bukit Hijau	58
1. Sistem Tenur	58
2. Sistem Teknologi Wanatani	62
B. Proses Perizinan Hutan Tanaman Rakyat	62
C. Pembangunan Lembaga	64
D. Penataan Areal dan Pembagian Hak Kelola	68
E. Unit Manajemen HTR Berbasis Kelompok Kerja Dalam KTH Bukit Hijau	69
1. Pembentukan Unit Manajemen HTR Berbasis Kelompok Kerja	69
2. Kerjasama KTH Bukit Hijau dalam Pengelolaan Lahan	71
3. Kerjasama Kelompok Kerja KTH Bukit Hijau dalam Penyakapan Lahan	72
4. Penerapan Sistem Tenure pada Kelompok Kerja dalam Unit Manajemen HTR KTH Bukit Hijau	73
F. Pengaturan Hasil dan Preskripsi Silvikultur	74
1. Pembagian Petak	74
2. Preskripsi Silvikultur	78
G. Analisis Biaya dan Manfaat Pengelolaan HTR	82
1. Asumsi Perhitungan Analisis Biaya dan Manfaat	82
2. Kelayakan Finansial Budidaya Sengon	84
3. Kelayakan Finansial Budidaya Kacang Tanah Dalam Areal HTR	88
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor		halaman
1.	Padanan Nama Tanah menurut berbagai Sistem Klasifikasi	25
2.	Fungsi dan Lokasi Penerapan Tenur dalam Pengelolaan Lahan	32
3.	Fungsi dan Lokasi Penerapan Tenur dalam Pemilikan Lahan	33
4.	Jenis dan Sumber Data Penelitian	43
5.	Alat dan Bahan Untuk Analisis Spasial	48
6.	Kawasan Hutan Kecamatan Camba Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan	52
7.	Fungsi dan Lokasi Penerapan Tenurial dalam Pengelolaan Lahan di Dusun Holiang Desa Cenrana Kecamatan Camba	61
8.	Daftar Nama Anggota Kelompok Tani Bukit Hijau Dusun Holiang Desa Cenrana Kecamatan Camba	65
9.	Pembagian Areal Kerja IUPHHK-HTR Anggota KTH Bukit Hijau	69
10.	Pembagian Unit Manajemen HTR KTH Bukit Hijau	70
11.	Sistem Tenur Per Petak pada Kelompok Kerja Dalam UMH KTH Bukit Hijau	74
12.	Luas Pembagian Petak Pada Unit Manajemen HTR	75
13.	Tabel Pendapatan, Pengeluaran dan NPDP Tanaman Sengon Monokultur Rotasi 5 Tahun/Ha, Suku Bunga 7%/Tahun	85

14.	Analisis Net Return At The Of End Rotation (NRER) / Ha Budidaya Sengon Rotasi 5 Tahun, Suku Bunga 7%/Tahun	86
15.	Tabel Suku Bunga, Penerimaan, Pengeluaran dan NPV HTR Budidaya Tanaman Sengon Rotasi 5 Tahun	88
16.	Perhitungan Nilai Pengembalian Dana Pinjaman Untuk Budidaya Kacang Tanah, Suku Bunga 24%/Tahun	89
17.	Rekap Hasil Analisis Finansial Budidaya Sengon Rotasi 5 Tahun Dan Keuntungan Budidaya Kacang Tanah Selama 3 Tahun	90

DAFTAR GAMBAR

nomor		halaman
1.	Proses Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR Perorangan	7
2.	Peta Susunan Kelas Hutan Normal, Rotasi 25 Tahun	11
3.	Petak, Nomor Petak dan Perkembangan Susunan Kelas Umur Tahun 1980-2000 Rotasi 25 Tahun	13
4.	Bagan Arus Sistem Kerja dalam SIG	19
5.	Tahap Pertumbuhan Kelompok (Stage of Group Development)	30
6.	Kerangka Pemikiran Penelitian	38
7.	Bagan Arus Analisis Penentuan Zona Penyangga	49
8.	Bagan Arus Analisis Pembagian Hak Kelola/ Ta'tang	49
9.	Bagan Arus Analisis Pembentukan Unit Manajemen HTR	50
10.	Jalanan Desa Cenrana	55
11.	Jalanan Dusun Holiang	56
12.	Jalanan Kampung	57
13.	Pola Tanam Budidaya Sengon Polikultur dengan Kacang Tanah	78
21.	Kayu Rakyat Jenis Sengon, Panjang 1,2 m dan Diameter > 15 cm di Depan Rumah Masyarakat	100

DAFTAR LAMPIRAN

nomor		Halaman
1.	Pedoman Wawancara di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros	96
2.	Pedoman Wawancara di Dusun Holiang Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros	98
3.	Pedoman Wawancara Dengan Pihak Industri PT. Panply	101
4.	Materi yang disampaikan pada FGD	102
5.	Peta Pertimbangan Teknis Areal IUPHHK-HTR KTH Bukit Hijau	105
6.	Peta Areal Tidak Produktif KTH Bukit Hijau	106
7.	Peta Aksesibilitas/Sarana Jalan KTH Bukit Hijau	107
8.	Peta Pembagian Hak Kelola/Ta'tang KTH Bukit Hijau	108
9.	Peta Unit Manajemen HTR KTH Bukit Hijau	109
10.	Peta Pengaturan Hasil KTH Bukit Hijau	110
11.	Perhitungan Biaya Pembangunan HTR Budidaya Sengon/Hektar Rotasi 5 Tahun	111
12.	Perhitungan Biaya Budidaya Kacang Tanah/ Hektar Dalam Areal IUPHHK-HTR	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya hutan merupakan salah satu sumber kekayaan bagi rakyat Indonesia dan sumberdaya alam andalan bagi Indonesia. Hutan sebagai sumberdaya alam yang dapat dikelola, mempunyai manfaat dan fungsi ganda bagi umat manusia baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Manfaat dan fungsi yang optimal dari hutan tersebut dapat diperoleh apabila hutan terjamin kelestariannya. Aktivitas sosial ekonomi baik dalam skala kecil maupun skala besar telah menyebabkan terjadinya tekanan ekologis berupa degradasi hutan yang berujung pada perubahan kualitas lingkungan. Pengelolaan yang baik akan memberikan dampak yang luas dan berjangka panjang, demikian pula sebaliknya, kesalahan dalam pengelolaan hutan akan dapat menimbulkan degradasi hutan, bahkan berdampak luas bagi sosial dan ekonomi.

Kondisi saat ini, masyarakat di sekitar dan dalam hutan telah terbiasa memanfaatkan hutan sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sumber penghasilan, dan sebagian besar merupakan masyarakat yang tergolong miskin. Selain itu, penurunan kondisi hutan juga mengakibatkan penurunan suplai kayu terhadap industri pengolahan kayu,

veneer, kayu lapis dan pulp. Kenyataan tersebut, telah mendorong pemerintah untuk mengembangkan suatu bentuk pengelolaan hutan yang diharapkan bisa mengatasi permasalahan tersebut, yaitu program hutan tanaman rakyat (HTR) yang bertujuan untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal dan adil, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses masyarakat sekitar hutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu program HTR harus didukung dengan pembinaan kelompok tani hutan (KTH) yang kuat.

Perkembangan pembangunan HTR di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2008 sampai dengan saat penelitian dilakukannya realisasinya mencapai 14% atau seluas ± 5.678 ha IUPHHK-HTR yang telah diterbitkan oleh Bupati dari pencadangan areal HTR seluas ± 40.535 ha yang tersebar di 12 kabupaten. Salah satu kabupaten yang telah diterbitkan IUPHHK-HTR oleh Bupati adalah Kabupaten Maros, yaitu KTH Pakkaraengan Indah di Desa Bonto Matinggi Kecamatan Tompobulu dengan luas ± 121 ha, sedang tiga KTH yang belum diterbitkan IUPHHK-HTRnya, yaitu: (1) KTH Bangkit Jaya di Desa Bonto Manai Kecamatan Tompobulu; (2) KTH Tunas Harapan di Desa Cenrana Kecamatan Camba, dan (3) KTH Bukit Hijau di Desa Cenrana Kecamatan Camba (BP2HP, 2012).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini ingin mengetahui hambatan yang dihadapi KTH Bukit Hijau di Desa Cenrana dalam proses penerbitan IUPHHK-HTR, bagaimana bentuk kelembagaannya dan bentuk unit manajemen berbasis kelompok kerja pada areal calon HTR KTH Bukit

Hijau. Pentingnya penerbitan IUPHHK-HTR di Kabupaten Maros kepada KTH yang telah bermohon diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan memberi akses kepada masyarakat agar mampu memanfaatkan dan mengelola hutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu bentuk pengelolaan oleh Unit Manajemen HTR dan dukungan kelembagaan berbasis kelompok kerja dalam KTH.

B. Rumusan Masalah

Pengelolaan areal HTR dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan kebiasaan para petani penggarap atau masyarakat setempat. Bentuk pengelolaan hutan yang baik harus diterapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui unit manajemen dan dukungan kelembagaan KTH yang kuat dalam pengelolaan HTR. Rumusan masalah yang perlu dikaji dan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem kelompok kerja HTR dalam KTH Bukit Hijau?
2. Bagaimana bentuk pengelolaan HTR oleh kelompok kerja pada unit manajemen HTR yang layak diterapkan oleh KTH Bukit Hijau di Dusun Holiang, Desa Cenrana, Kecamatan Camba Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian dan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme kerja kelompok kerja HTR pada KTH Bukit Hijau.
2. Mengetahui bentuk pengelolaan HTR oleh kelompok kerja pada unit manajemen HTR yang dapat diterapkan di lokasi KTH Bukit Hijau.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mengkaji unit manajemen HTR serta dukungan kelembagaan dalam rangka pembangunan HTR, sehingga penelitian ini dapat berguna dalam hal :

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam proses penerbitan IUPHHK-HTR perorangan KTH Bukit Hijau oleh pemerintah setempat.
2. Dapat diterapkan oleh anggota KTH Bukit Hijau dalam rangka pengelolaan HTR jika IUPHHK-HTR diterbitkan oleh Bupati Maros.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Defenisi Hutan Tanaman Rakyat

Kebijakan Kementerian Kehutanan untuk memberikan hak akses bagi masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan khususnya pada hutan produksi, salah satunya melalui program pembangunan HTR. Berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008 berbunyi "Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dapat dilakukan pada: (a) HTI (hutan tanaman industri); (b) HTR (hutan tanaman rakyat); atau (c) HTHR (hutan tanaman hasil reboisasi)". Program HTR bertujuan untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal dan adil, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses masyarakat di sekitar hutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Definisi hutan tanaman rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin

kelestarian sumberdaya hutan. IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur untuk menjamin kelestarian sumberdaya hutan (Kementerian Kehutanan, 2011)

2. Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat

Pemerintah telah mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat melalui program HTR berupa IUPHHK-HTR perorangan maupun koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi, mewujudkan pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses masyarakat di sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian IUPHHK-HTR dilakukan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai areal alokasi atau penetapan IUPHHK-HTR. Areal alokasi dan penetapan IUPHHK-HTR dilakukan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin/hak lain serta didasarkan pada rencana pembangunan HTR yang diusulkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala KPHP dengan luas areal pencadangan disesuaikan dengan keberadaan masyarakat di sekitar hutan dan diutamakan dekat dengan industri kehutanan (Kementerian Kehutanan, 2011).

desa dengan tembusan kepala BP2HP. Permohonan dilampiri persyaratan permohonan yang diajukan oleh perorangan: (a) foto copy KTP; (b) keterangan dari Kepala Desa/Lurah bahwa pemohon berdomisili di desa tersebut, dan (c) sketsa areal yang dimohon.

2. Kepala desa melakukan verifikasi KTP atau domisili berdasarkan permohonan IUPHHK-HTR, dan hasil verifikasi permohonan disampaikan kepada kepala dinas kabupaten/kota dan atau kepala KPHP dengan tembusan kepada camat dan kepala BP2HP.
3. Berdasarkan tembusan hasil verifikasi permohonan IUPHHK-HTR dari kepala desa, BP2HP berkoordinasi dengan BPKH dan melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi dan sketsa/peta areal yang dimohon, hasilnya disampaikan kepada bupati/walikota dan atau kepala KPHP sebagai pertimbangan teknis.
4. Berdasarkan pertimbangan dari kepala BP2HP, bupati/walikota/ kepala KPHP atas nama menteri menerbitkan IUPHHK-HTR perorangan dengan tembusan kepada: (a) menteri; (b) gubernur; (c) Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan; (d) kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan; (e) kepala dinas kabupaten yang membidangi kehutanan, dan (f) kepala BP2HP.

Lebih lanjut menurut Kementerian Kehutanan (2011), kegiatan IUPHHK-HTR antara lain kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK-HTR merupakan aset pemegang izin usaha, dan

dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku. Dalam hal terdapat tegakan hutan alam pada areal yang dicadangkan sebagai areal pencadangan HTR, areal hutan alam tersebut ditetapkan sebagai areal perlindungan setempat dan pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pembangunan HTR dapat dibiayai melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H), perbankan maupun pihak lain yang tidak mengikat. Dalam hal Pemegang IUPHHK-HTR akan meminjam dana pembangunan HTR kepada BLU Pusat P2H, maka Pemegang IUPHHK-HTR wajib melunasi pinjaman tersebut kepada BLU Pusat P2H dan mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Pola HTR terdiri atas:

- a. HTR pola mandiri adalah HTR yang dibangun oleh pemegang IUPHHK-HTR.
- b. HTR pola kemitraan adalah HTR yang dibangun oleh pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitra berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh pemerintah/pemerintah daerah agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak.
- c. HTR pola developer adalah HTR yang dibangun oleh BUMN atau BUMS atas permintaan pemegang IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab pemegang IUPHHK-HTR.

Menurut Kementerian Kehutanan (2011), budidaya tanaman HTR dilaksanakan berdasarkan kondisi tapak, sosial ekonomi dan sosial budaya

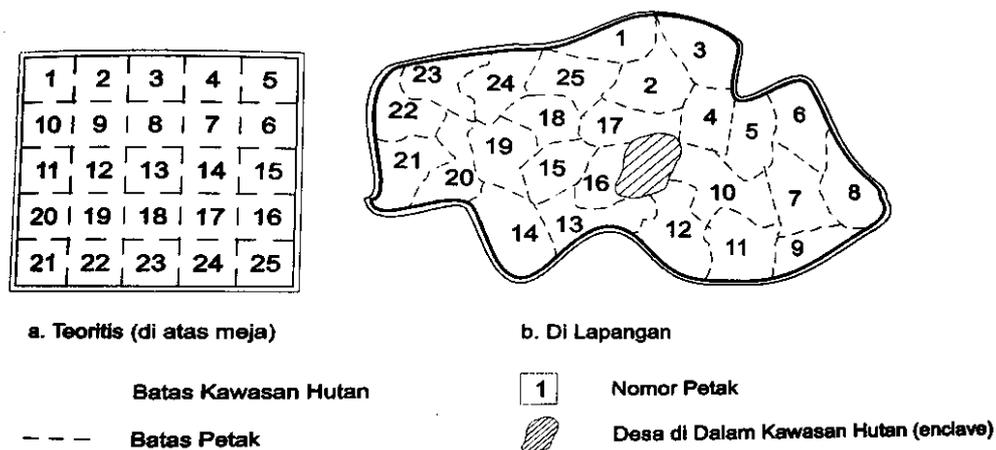
setempat. Jenis tanaman pokok yang dapat dikembangkan untuk pembangunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR terdiri atas :

- a. Tanaman sejenis adalah tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri satu jenis (*species*) dan varietasnya.
- b. Tanaman berbagai jenis adalah tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu antara lain karet, tanaman berbuah, bergetah dan pohon penghasil pangan dan energi. Tanaman budidaya tahunan paling luas 40% (empat puluh persen) dari areal kerja dan tidak didominasi oleh satu jenis tanaman.

3. Pengaturan Hasil Hutan

Sistem pengelolaan yang lebih intensif merupakan istilah yang dipakai pada hutan yang tertata penuh (*fully-regulated forest*), yaitu hutan dengan tendon penuh diharapkan dapat dipakai pada suatu waktu tertentu, khususnya pada akhir daur. Selama jangka waktu satu daur tersebut, hutan akan dikelola dengan teratur untuk memperoleh manfaat hutan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan dan keadaan setempat. Untuk mewujudkan ketentuan tersebut, pengelolaan hutan harus intensif dan bervariasi dari petak ke petak (*management regimes*). Untuk memaksimalkan setiap jengkal kawasan hutan sesuai dengan kondisi fisik maupun sosial ekonomi masyarakat (Simon, 2010).

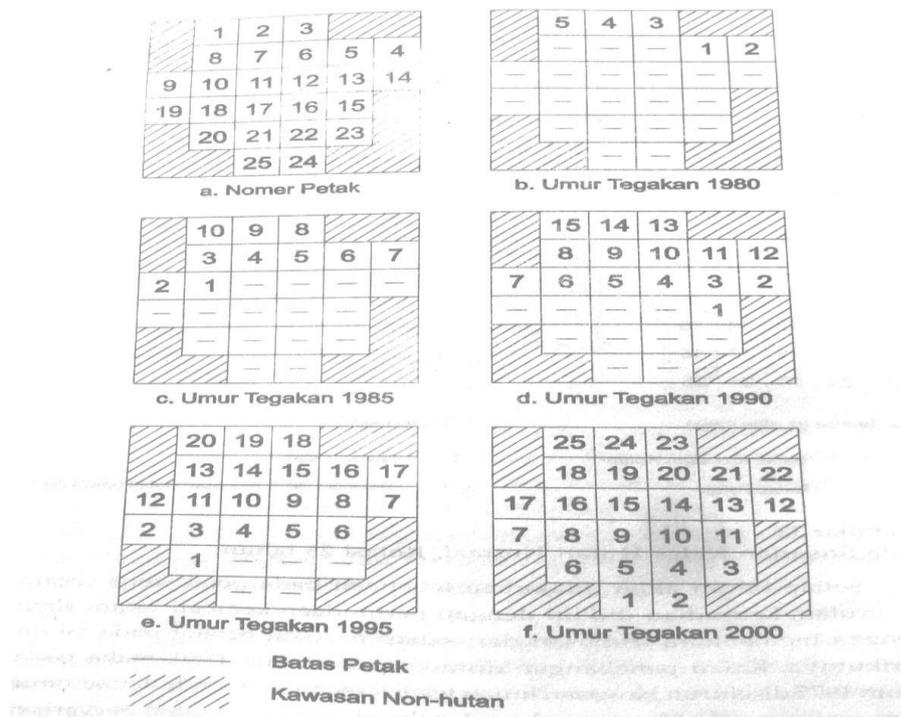
Menurut Simon (2010), lahirnya konsep hutan normal sebenarnya tak dapat dilepaskan dari harapan setelah pelaksanaan sistem pengaturan hasil yang paling sederhana, yaitu *annual coupe* atau *vak-werk*. Dengan sistem pengaturan hasil ini, setelah rotasi diaplikasikan akan terbentuk hutan dengan susunan umur yang teratur. Misalkan kelas perusahaan kayu bakar dengan luas 500 ha dikelola dengan sistem silvikultur pangkas (*coppies sistem*) yang menggunakan rotasi 25 tahun. Dengan metoda pengaturan hasil *annual coupe*, seluruh kawasan dibagi menjadi 25 petak yang sama luasnya; jadi luas tiap petak adalah $500:25 = 20$ ha. Tiap petak diberi batas dan nomor yang tetap, yaitu nomor 1 sampai dengan 25. Secara skematis pembagian kawasan hutan dalam petak-petak kerja (*vak-werk*) dilukiskan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Peta Susunan Kelas Hutan Normal, Rotasi 25 Tahun (Simon, 2010)

Pemberian nomor petak dimulai dari barat laut, berputar mengikuti arah jarum jam. Misalkan dalam Gambar 2, petak pada jalur A diberi nomor 1 dan 2, demikian seterusnya sampai petak 25 terletak pada jalur E. Posisi ini terlukis tahun 1950 dalam gambar tersebut, maka pada tahun 1975 diseluruh kawasan hutan telah terbentuk hutan-hutan seumur pada setiap petak. Umur tegakan di seluruh kawasan hutan bervariasi dari 1-25 tahun, berurutan dari petak 1 sampai petak 25. Angka-angka yang tertera dalam Gambar 2 tersebut menunjukkan umur tegakan di petak yang bersangkutan setelah pelaksanaan selama satu rotasi. Dengan demikian susunan umur tegakan pada tahun 1975 adalah mulai petak pertama yang berumur 25 tahun, petak kedua berumur 24 tahun dan seterusnya sampai petak 25 berisi tegakan dengan umur satu tahun. Pada tahun 1975 tersebut, tebangan untuk rotasi kedua dimulai dari petak pertama lagi yang telah mencapai umur masak terbang (25 tahun). Dengan demikian setiap tahun dapat dilakukan tebangan terhadap suatu petak yang umur tegakannya telah mencapai umur daur (25 tahun). Selanjutnya dengan mudah susunan tegakan pada tahun 1976 dapat dibuat, dan pada waktu itu penebangan dilakukan pada petak kedua yang umur tegakannya telah bertambah satu tahun menjadi 25. Demikian seterusnya sehingga pada Tahun 2000 susunan kelas umur sudah kembali seperti pada Tahun 1975. Tahun 2001 mulai lagi dengan tebangan pada rotasi ketiga di petak pertama dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti yang dilakukan selama penebangan pada rotasi pertama. Susunan tegakan seperti itu, yang terdiri atas berbagai umur

yang komplit dari 1 tahun sampai umur masak tebang atau umur daur, dan luas masing-masing umur juga sama, dapat dilukiskan dalam bagan koordinat yang menghubungkan antara umur dan volume tegakan riap umur. Lukisan tersebut disajikan dalam Gambar 3, tiap kotak dalam gambar tersebut melukiskan pertumbuhan volume tegakan atau riap setiap tahun yang telah dilalui oleh tegakan yang bersangkutan. Jadi tegakan yang baru berumur satu tahun dilukiskan oleh satu kotak, demikian seterusnya sampai tegakan yang berumur 25 tahun telah memiliki 25 kotak atau riap 25 tahunan (Simon, 2010).



Gambar 3. Petak, Nomor Petak dan Perkembangan Susunan Kelas Umur Tahun 1980-2000 Rotasi 25 Tahun (Simon, 2010)

Daur adalah jangka waktu dalam tahun yang diperlukan oleh suatu jenis untuk mencapai umur masak tebang, dihitung sejak jenis itu ditanam. Nampak dari definisi tersebut bahwa konsep daur dipakai untuk pengelolaan hutan dengan tujuan menghasilkan kayu dari tegakan seumur yang ditanam secara monokultur. Di kalangan rimbawan istilah daur (oomlop) sering dianggap sama dengan rotasi (rotatie, rotation). Munculnya konsep daur tidak dapat dilepaskan dengan konsep hutan normal. Tujuan dikemukakan konsep hutan normal ditujukan untuk menyajikan susunan kelas hutan yang memudahkan pelaksanaan konsep kelestarian hasil kayu. Idealnya, di dalam suatu hutan normal setiap kelompok tegakan akan ditebang pada umur daur. Oleh karena itu di dalam pengelolaan hutan seumur, menentukan panjang daur mempunyai peranan yang sangat penting, yang sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas tercapainya tujuan pengelolaan (Simon, 2010).

4. Pengelolaan Hutan

Definisi kelestarian hasil menurut ahli, yaitu:

- a. Dalam Conservation Code 1938, Meyer dkk., (1916) dalam Simon (2010), diterangkan definisi kelestarian hasil adalah pengelolaan kawasan hutan tertentu yang jelas status kepemilikannya, dengan luas wilayah yang ekonomis, dan memiliki sistem pengelolaan yang jelas berdasarkan rencana kerja yang rasional.

- b. Menurut Osmaton (1968) dalam Simon (2010), mendefinisikan pengertian kelestarian hasil hutan sebagai suplai hasil hutan yang teratur dan berkesinambungan (kontinyu) sesuai dengan kapasitas maksimal suatu kawasan hutan.

Selanjutnya Simon (2010) menjelaskan bahwa definisi tersebut sudah jauh berkembang dibandingkan dengan definisi kelestarian hasil hutan yang ditulis oleh Cotta. Kalau Cotta hanya memusatkan kayu sebagai hasil utama, maka definisi Osmaton sudah memasukkan semua jenis hasil hutan yang telah dapat dimanfaatkan oleh manusia baik yang dapat dinilai dengan uang (*tangible*) maupun yang tidak dapat atau sulit dinilai dengan uang (*intangible*). Sampai sekarang hasil hutan masih lazim dipisahkan antara hasil utama (*major products*) yang berupa kayu, dan hasil hutan sampingan (*minor products*) yang berupa non kayu.

Osmaton (1968) dalam Simon (2010) melukiskan berbagai tipe pengelolaan hutan sebagai berikut: (a) Hasil integral, yaitu bila hutan tersusun atas pohon dengan umur yang sama, dan kemudian ditebang lalu dilakukan permudaan pada waktu yang sama pula. Tipe ini berlaku untuk kepemilikan hutan yang kecil, khususnya dengan daur pendek sampai menengah. Di kehutanan daur menengah berkisar 30 sampai 50 tahun, sedang daur pendek dapat dimulai dari 8 sampai 25 tahun. Untuk daur panjang penebangan baru dilakukan setelah tegakan berumur 60 tahun sampai 100 tahun; (b) Hasil yang bergiliran (*intermitten yields*), yaitu bila di dalam kawasan hutan ada berbagai kelas umur sehingga pohon yang

menyusun hutan tersebut masak setelah mencapai umur tertentu, kemudian ditebang pada saat-saat tertentu pada waktu ada tegakan yang telah mencapai umur masak tebang, dan (c) Hasil hutan, bila selalu ada kayu yang siap ditebang setiap tahun.

Mempelajari pembangunan kehutanan berasaskan kelestarian, yang berhasil di negara-negara tertentu, menarik untuk dikaji apa sebenarnya yang menjadi kunci keberhasilan tersebut. Simon (2010) menyimpulkan bahwa ada tiga syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu: (a) adanya batas-batas kawasan hutan yang tetap dan diakui semua pihak; (b) adanya sistem silvikultur yang menjamin terlaksananya permudaan hutan yang mesti berhasil, dan (c) penentuan etat tebang yang menjamin terwujudnya kelestarian hasil kayu.

Untuk mencapai hutan normal, diperlukan pemilihan yang tepat tentang sistem pengaturan hasil dan teknik silvikultur yang akan dipakai. Perlakuan silvikultur untuk memelihara tegakan harus direncanakan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang memadai, sehingga semua tempat atau kelompok hutan akan dalam keadaan penuh oleh jenis yang cocok dengan kondisi tempat tumbuh tersebut. Tegakan akan dijarangi secara periodik untuk memberi ruang tumbuh yang optimal bagi tegakan tinggal, dan untuk mencapai riap yang maksimal sesuai dengan dimensi kayu atau umur yang diperlukan oleh tujuan pengelolaan tertentu (Simon, 2010).

5. Pengetahuan Sistem HutanTanaman Rakyat

Hutan rakyat dengan segala produksinya juga memberikan hasil tambahan bagi ekonomi keluarga. Kebutuhan keluarga yang bersifat mingguan dan tahunan acapkali dapat terpenuhi dari hasil penebangan kayu dan hasil hutan non kayu. Potensi hutan rakyat berupa kayu dengan luasan tertentu yang dimiliki masyarakat melalui wadah kelompok tani hutan dengan kegiatan inventarisasi dan pemetaan, akan mampu berkembang menjadi kawasan pengelolaan hutan rakyat kolektif. Sentuhan kalkulasi yang sederhana dapat menjadikan hutan rakyat dapat dikelola secara lestari (Awang, 2009).

Perhitungan etat yang menggambarkan jumlah tebangan kayu yang diperbolehkan dalam satu tahun, dapat menjadi acuan bagi organisasi kelompok tani hutan dalam mengelola hutan rakyat secara kolektif. Etat tebangan secara kolektif ini dapat berguna untuk mengontrol jumlah tebangan kayu di masing-masing keluarga. Sesungguhnya pengetahuan tentang pengaturan hasil hutan rakyat dapat diterapkan dalam rencana kelola hutan rakyat di desa-desa kajian. Tentu saja juga pengaturan hasil tersebut menyangkut hasil hutan kayu, jasa rekreasi, peternakan, dan bisnis gula kelapa (Awang, 2009).

6. Batas Kawasan Hutan

Adanya batas kawasan hutan yang tetap sangat penting, sebab kalau tidak demikian kegiatan membangun hutan akan sangat terganggu karena masa berproduksi hutan bersifat jangka panjang dan pengelolaannya tidak dapat diatur untuk cepat mengalami perubahan dalam waktu singkat atau mendadak. Misalnya, kalau tidak ada batas kawasan hutan yang tetap, pekerjaan membangun hutan dapat sia-sia kalau sebelum waktu masak tebang batas kawasan hutannya dilanggar untuk kepentingan pertanian, peternakan, dan perkebunan (Simon, 2010).

Awal kegiatan pengelolaan hutan, seringkali penentuan batas kawasan hutan tidak hanya bersaing dengan tiga macam kegiatan pengelolaan lahan lainnya itu. Penentuan kawasan hutan juga berhadapan dengan hak ulayat atau nilai-nilai adat yang berkaitan dengan penguasaan lahan. Kegiatan pertanian, peternakan, dan perkebunan tidak terlepas dengan hak individu masyarakat berkaitan dengan pemilikan lahan (*land tenure*) (Simon, 2010).

7. Sistem Informasi Geografis (SIG)

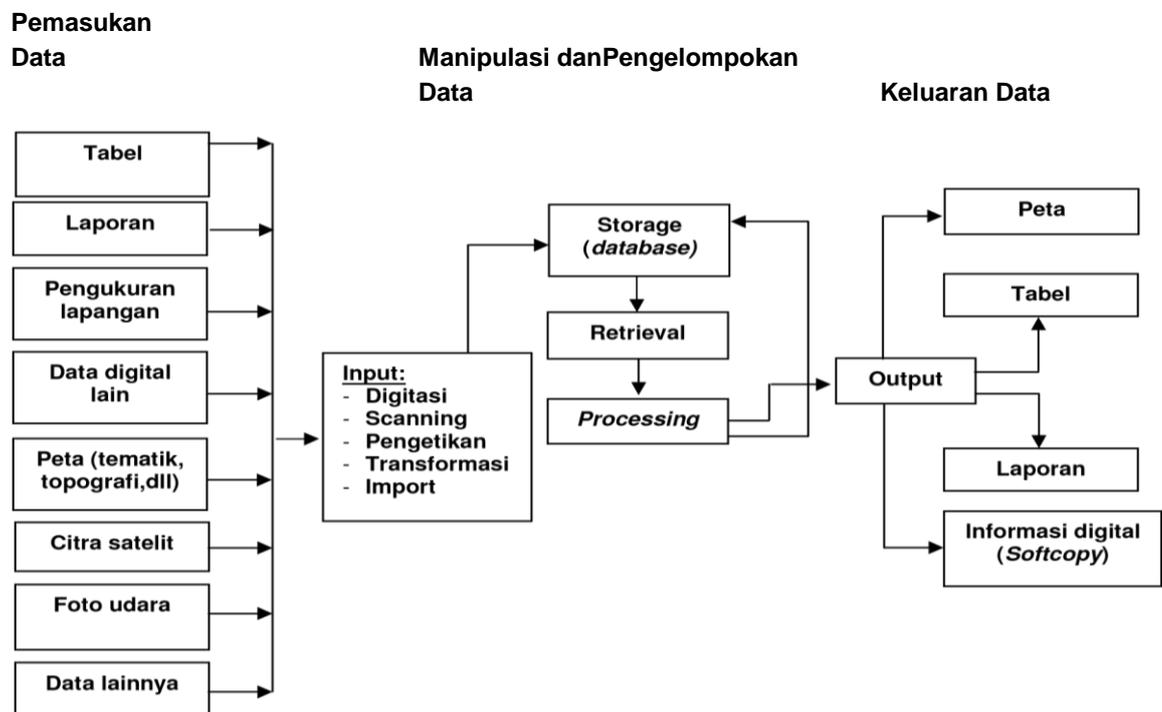
a. Pengertian SIG

SIG atau *Geographical Information Systems (GIS)* merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memasukan, menyimpan, menelusuri, memanipulasi, analisis, dan keluaran data bereferensi

geografik atau data geospasial untuk pengambilan keputusan. Sistem terdiri dari pengambilan, seleksi (*sorting*), pemeriksaan (*checking*), pengintegrasian, analisa, dan penayangan (*displaying*) data mengenai bumi (*earth*) yang mempunyai referensi spasial. Pada dasarnya, SIG menyertakan basis data bereferensi spasial dan aplikasi-aplikasi perangkat lunak. Data spasial menggambarkan lokasi spasial objek. Gambaran data diwakili oleh unsur titik, garis, dan area (*polygon*) (Atmadilaga. A. H, 2010).

b. Kemampuan SIG

Definisi-definisi tersebut menjelaskan bahwa secara umum SIG memiliki kemampuan dalam menangani data yang bereferensi geografis yang dapat dijelaskan secara sederhana pada gambar di bawah ini:



Gambar 4. Bagan Arus Sistem Kerja dalam SIG (Prahasta, 2002)

c. Pemasukan Data

Data input (pemasukan data) memiliki fungsi dalam mengkonversi dan mentransformasikan ke dalam format yang dapat digunakan oleh SIG. Bentuk data dalam SIG dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data raster dan data vektor. Data raster adalah data dimana semua obyek disajikan secara sekuensial pada kolom dan baris dalam bentuk sel-sel atau yang sering disebut sebagai pixel (*picture element*). Masing-masing sel mewakili suatu areal yang berbentuk segi empat dan umumnya bujur sangkar. Dalam model ini, setiap objek baik yang berbentuk titik, garis dan polygon semuanya disajikan dalam bentuk sel (titik). Setiap sel memiliki koordinat dan informasi (Prahasta, 2002).

d. Manajemen Data

Manajemen data sebagai suatu kegiatan mengorganisasikan baik data spasial maupun data atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate dan diedit. Setelah data diinput ke dalam SIG, data tersebut dikoreksi dan diperbaiki serta dibuat topologi, yaitu menghubungkan data spasial dan data atribut sebelum disimpan untuk dianalisis (Prahasta, 2002).

e. Manipulasi dan Pengelompokan Data

Fungsi manipulasi dan analisis data adalah memungkinkan pengguna data melakukan berbagai jenis kegiatan, seperti mengubah bentuk data, melakukan perbaikan data, melakukan penampalan (*overlay*) data dan perhitungan aritmetik atau generalisasi tentang informasi yang

diperoleh. Pada dasarnya, manipulasi dan analisis data yang terdapat dalam SIG, diantaranya yaitu klasifikasi dan pengumpulan kembali sifat data, perbaikan geometri, rotasi, pemberian skala, kombinasi dan konversi, penempatan dan pembagian garis, konversi struktur data, analisis ruang dan hubungan secara statistik, pengukuran jarak dan arah, analisis statistic. Manipulasi merupakan kegiatan menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG serta melakukan manipulasi dan permodelan untuk menghasilkan informasi yang diharapkan (Widjoyo dalam Bagja (2000)).

f. Keluaran Data

Merupakan suatu prosedur dimana informasi SIG dipresentasikan dalam bentuk yang diinginkan oleh user atau pengguna. Keluaran data terdiri atas: hardcopy, softcopy, dan elektronik (Atmadilaga. A. H, 2010).

g. Aplikasi SIG

Aplikasi SIG sangat menarik untuk digunakan dalam berbagai bidang ilmu, yaitu SIG sangat efektif, dapat digunakan sebagai alat bantu, mampu menguraikan unsur-unsur yang terdapat di permukaan bumi ke dalam bentuk beberapa layer atau coverage data spasial, memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data spasial dan bentuk atribut-atributnya serta dapat menurunkan data-data secara otomatis tanpa keharusan untuk melakukan interpretasi secara manual (Prahasta, 2002).

8. Jenis-jenis Tanah Menurut Sistem Pusat Penelitian Tanah

Nama-nama tanah dalam tingkat jenis dan macam tanah dalam sistem Pusat Penelitian Tanah yang disempurnakan sangat mirip dengan sistem FAO/UNESCO (Tabel 1). Walaupun demikian nama-nama lama yang sudah terkenal tetap dipertahankan, tetapi menggunakan definisi-definisi baru (Hardjowigeno, S. 2003).

Nama-nama tanah dan definisinya yang disederhanakan menurut Hardjowigeno, S. (2003):

Organosol : Tanah organik (gambut yang tebalnya lebih dari 50 cm.

Litosol : Tanah mineral yang tebalnya 20 cm atau kurang. Di bawahnya terdapat batuan keras yang padu.

Rendzina : Tanah dengan epipedon mollik (warna gelap, kandungan bahanorganik lebih 1 %, kejenuhan basa lebih 50 %, dibawahnya terdiri dari batuan kapur.

Grumusol : Tanah dengan kadar liat lebih dari 30 % bersifat mengembang dan mengkerut. Kalau musim kering tanah keras dan retak-retak karena mengkerut, kalau basah lengket (mengembang).

Gleisol : Tanah yang selalu jenuh air sehingga berwarna kelabu atau menunjukkan sifat-sifat hidromorfik lain.

Aluvial : Tanah berasal dari endapan baru, berlapis-lapis, bahan organik jumlahnya berubah tidak teratur dengan kedalaman. Hanya terdapat epipedon ochrik, histik atau sulfurik, kandungan pasir kurang dari 60 %.

- Arenosol : Tanah berstruktur kasar dari bahan alvik yang terdapat pada kedalaman sekurang-kurangnya 50 cm dari permukaan atau memperlihatkan ciri-ciri mirip horison argilik, kambik atau oksik, tetapi tidak memenuhi syarat karena tekstur teralu kasar. Tidak mempunyai horison penciri kecuali epipedon ochrik.
- Andosol : Tanah-tanah yang umumnya berwarna hitam (epipedon mollik atau umbrik dan mempunyai horison kambik; bulk density) kerapatan lindak kurang dari 0.85 gr/cm³; banyak mengandung bahan amorf, atau lebih dari 60 % terdiri dari abu vulkanik vitrik, cinders, atau bahan pryroklasik lain.
- Latosol : Tanah dengan kadar liat lebih dari 60 %, remah sampai gumpal, gembur, warna seragam dengan batas-batas horison yang kabur, solum dalam (lebih dari 150 cm), kejenuhan basa kurang dari 50 %, umumnya mempunyai epipedon umbrik dan horison kambik.
- Brunizem : Seperti Latosol, tetapi kejenuhan basa lebih dari 50 %.
- Kambisol : Tanah dengan horison kambik, atau epipedon umbrik, atau mollik. Tidak ada gejala-gejala hidromorfik (pengaruh air).
- Nitosol : Tanah dengan penumbunan liat (horison argilik). Dari horison penimbunan liat maksimum ke horison-horison dibawahnya, kadar liat kurang dari 20 %. Mempunyai sifat ortosik (Kapasitas Tukar Kation kurang dari 24 me/100 gr liat).

- Podsolik : Tanah dengan horison penimbunan liat (horison argilik), dan kejenuhan basa kurang dari 50 %. Tidak mempunyai horison albik.
- Mediteran : Seperti tanah Podsolik mempunyai horison argilik tetapi kejenuhan basa lebih dari 50 %.
- Planosol : Tanah dengan horison albik yang terletak di atas horison dengan permeabilitas lambat (misalnya horison argilik atau natrik yang memperlihatkan perubahan tekstur nyata, adanya liat berat atau pragipan, dan memperlihatkan ciri-ciri hidromorfik sekurang-kurangnya pada sebagian dari horison albik.
- Podsol : Tanah horison penimbunan besi, Al oksida dan bahan organik (horison spodik). Mempunyai horison albik.
- Oksisol : Tanah dengan pelapukan lanjut dan mempunyai horison oksik, yaitu horison dengan kandungan mineral mudah lapuk rendah, fraksi liat dengan aktifitas rendah, Kapasitas Tukar Kation rendah (kurang dari 16 me/100 gr liat). Tanah ini juga mempunyai batas-batas horison yang tidak jelas.

Tabel 1. Padanan Nama Tanah menurut berbagai Sistem Klasifikasi (Hardjowigeno, S. 2003)

No.	Sistem Dudal- Soepraptohardjo (1956/1961).	Modifikasi 1978/1982 (PPT)	FAO/UNESCO (1974)	USDA Soil Taxonomy (1975)
1.	Tanah Aluvial	Tanah Aluvial	Fluvisol	Entisol
2.	Andosol	Andosol	Andosol	Inceptisol
3.	Brown Forest Soil	Kambisol	Cambisol	Andisol
4.	Grumusol	Grumusol	Vertisol	Inceptisol
5.	Latosol	Kambisol	Cambisol	Vertisol
		Latosol	Nitosol	Inceptisol
		Lateritik	Ferralsol	Ultisol
6.	Litosol	Litosol	Litosol	Entisol
7.	Mediteran	Mediteran	Luvisol	Alfisol/Inceptisol
8.	Organosol	Organosol	Histosol	Histosol
9.	Podsol	Podsol	Podsol	Spodosol
10.	Podsol Merah Kuning	Podsolik	Acrisol	Ultisol
11.	Podsol Coklat	Kambisol	Cambisol	Inceptisol
12.	Podsol Coklat Kekelabuan	Podsolik	Acrisol	Ultisol
13.	Regosol	Regosol	Regosol	Entisol/Inceptisol
14.	Renzina	Renzina	Renzina	Rendoll
15.	-	Ranker	Ranker	-
16.	Tanah-tanah Berglei	Gleisol	Gleysol	Aquic Sub ordo
	Glei Humus	Gleisol Humik		Inceptisol (Aquept)
	Glei Humus Rendah	Gleisol		Inceptisol (Aquept)
	Hidromorf	Podsolik	Gleyic	Ultisol
	Kelabu	Gleik	Acrisol	(Aquult)
	Aluvial Hidromorf	Gleisol Hidrik		Inceptisol (Aquept)
17.	Planosol	Planosol	Planosol	Inceptisol (Aquept)

9. Kelompok Tani Hutan

a. Kelompok Tani

Definisi Kelompok menurut para ahli, yaitu:

- 1) Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut (Mulyana, 2000).
- 2) Kelompok tani adalah petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) keakraban dan keserasian yang dipimpin oleh seorang ketua (Trimo, 2006).
- 3) Kelompok Tani menurut Mardikanto (1993), diartikan sebagai kumpulan orang-orang petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna (pemuda/pemudi) yang terikat secara formal dalam suatu wilayah keluarga atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.

Menurut Suhardiyono (1992), kelompok tani biasanya dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang dipilih atas dasar musyawarah dan mufakat diantara anggota kelompok tani. Pada waktu pemilihan ketua kelompok tani sekaligus dipilih kelengkapan struktur organisasi kelompok tani, yaitu sekretaris kelompok, bendahara kelompok, serta seksi-seksi yang mendukung kegiatan kelompoknya. Seksi-seksi yang ada disesuaikan dengan tingkat dan volume kegiatan yang akan dilakukan. Masing-masing

pengurus dan anggota kelompok tani harus memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas dan dimengerti oleh setiap pemegang tugasnya. Selain itu juga kelompok tani harus memiliki dan menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku bagi setiap kelompoknya dengan sanksi-sanksi yang jelas dan tegas. Biasanya jumlah anggota kelompok tani berkisar antara 10-25 orang anggota.

Menurut Samsudin (1993), suatu kelompok sosial seperti halnya kelompok tani, selalu mempunyai apa yang disebut *external structure* atau *socio group* dan *internal structure* atau *psycho group*. *External structure* dalam kelompok tani adalah dinamika kelompok, yaitu aktivitas untuk menanggapi tugas yang timbul karena adanya tantangan lingkungan dan tantangan kebutuhan, antara lain termasuk tuntutan meningkatkan produktivitas usahatani, sedang *internal structure* adalah menyangkut norma atau pranata dan kewajiban dalam mencapai prestasi kelompok. *Internal structure* akan sekaligus merupakan dasar solidaritas kelompok yang timbul dari adanya kesadaran setiap anggota kelompok tani yang bersangkutan.

b. Dinamika Kelompok Tani

Menurut Suhardiyono (1992), dinamika kelompok tani adalah gerakan bersama yang dilakukan oleh anggota kelompok tani secara serentak dan bersama-sama dalam melaksanakan seluruh kegiatan kelompok tani dalam mencapai tujuannya, yaitu peningkatan hasil produksi dan mutu yang gilirannya nanti akan meningkatkan pendapatan mereka.

Dinamika kelompok tani mencakup seluruh kegiatan, meliputi inisiatif, daya kreatif dan tindakan nyata yang dilakukan oleh pengurus dan anggota kelompok tani dalam melaksanakan rencana kerja kelompoknya yang telah disepakati bersama. Untuk melakukan analisis terhadap Dinamika Kelompok, pada hakekatnya dapat dilakukan melalui dua macam pendekatan, yakni: (1) Pendekatan sosiologis, yaitu analisis dinamika kelompok melalui analisis terhadap proses sistem sosial dan (2) Pendekatan psiko-sosial, yaitu analisis dinamika kelompok melalui analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok itu sendiri. Pendekatan seperti ini, lebih sering diterapkan pada kelompok-kelompok tugas. Meskipun demikian, karena banyak kelompok (seperti halnya kelompok tani) masih merupakan bentuk peralihan dari kelompok sosial ke kelompok tugas, di dalam analisis dinamika kelompoknya seringkali masih dilakukan penggabungan terhadap kedua macam pendekatan tersebut (Mardikanto, 1996).

c. Kelompok Kerja Paguyuban

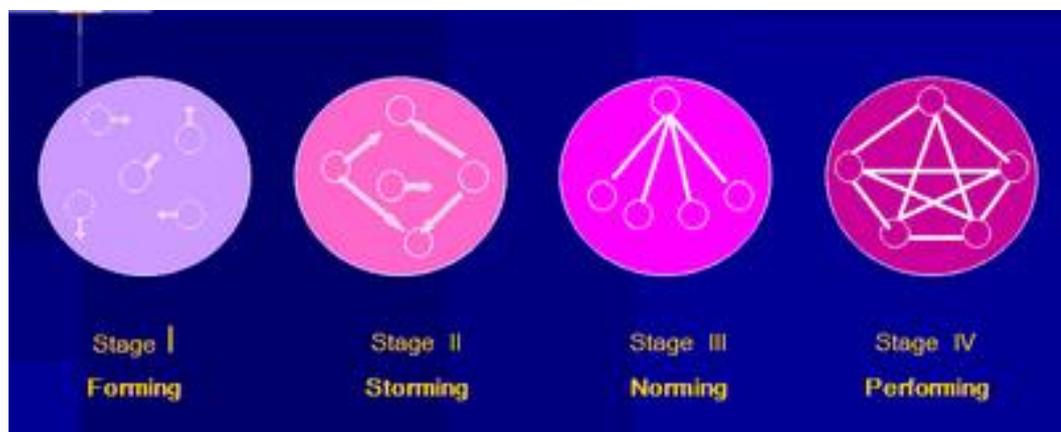
Menurut Marsali (2011), mekanisme *gemeinschaft* bekerja melalui penjati dirian yang kuat dari masing-masing anggota terhadap semua anggota komunitas yang lain. Seseorang merasakan bahwa dirinya menjadi satu dengan komunitas desanya. Tidak ada lagi orang per orang, yang ada adalah seseorang yang merupakan bagian dari komunitas. Jika setiap orang punya rasa identifikasi komunitas yang sangat kuat dalam jaringan kegiatan komunitas, dan jika dia merasa bahwa nasib dirinya adalah nasib

komunitasnya juga, maka dia akan menjalankan kegiatan untuk menjamin kemakmuran bersama. Di desa-desa, kita mengenal satu pameo populer untuk menyatakan hal tersebut, yaitu "satu untuk semua, semua untuk satu" atau "dari kita, oleh kita, untuk kita". Situasi *gemeinschaft* (guyub) yang seperti ini biasanya hidup dalam komunitas-komunitas kecil yang tertutup dan terisolasi dari dunia luar, dimana semua anggota saling kenal mengenal satu sama lain dalam waktu yang lama. Mereka telah terikat kuat satu sama lain, dan juga terikat dengan institusi-institusi yang hidup dalam komunitas. Hal seperti ini masih dapat ditemui pada masyarakat desa Dayak Tradisional di hutan-hutan pedalaman Kalimantan. Namun situasi seperti tentu itu akan luntur bila desa tumbuh menjadi makin modern, makin besar, dan penduduknya makin heterogen dan mobile, dan yang lebih penting lagi adalah kalau desa tersebut terkena pengaruh ekonomi pasar (market).

10. Kelompok Kerja

Kelompok kerja adalah sekumpulan orang, terdiri atas dua anggota atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama, kepentingan sama, saling bekerjasama, saling berhubungan, memiliki rasa ikut bertanggung jawab, dan saling tergantung satu dengan lainnya. Kelompok kerja adalah kelompok yang terutama berinteraksi untuk membagi informasi dan keputusan untuk membantu tiap anggota dalam bidang tanggungjawabnya. Tim kerja adalah kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan

individual. Klasifikasi kelompok yaitu: (a) **kelompok formal**, suatu kelompok kerja yang ditandai dengan adanya struktur organisasi; (b) **kelompok komando**, seorang manajer dan bawahan-bawaahan langsungnya; (c) **kelompok tugas**, mereka yang bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas pekerjaan; (d) **kelompok informal**, suatu kelompok yang tidak terstruktur secara formal muncul sebagai tanggapan terhadap situasi sosial; (e) **kelompok kepentingan**, mereka yang bekerja bersama-sama untuk mencapai sasaran khusus yang menjadi kepedulian dari tiap anggotanya, dan (f) **kelompok persahabatan**, mereka yang bergabung bersama-sama karena mereka berbagi satu karakteristik atau lebih (ellopedia.blogspot.com/2010/09/kelompok-kerja.html).



Gambar 5. Tahap Pertumbuhan Kelompok (Stage of Group Development) (ellopedia.blogspot.com, 2010).

Tahap pertumbuhan kelompok (*stage of group development*), yaitu:

(a) **pembentukan**, ketidakpastian yang cukup tinggi dalam tujuan, struktur, perilaku, dan kepemimpinan; (b) **konflik**, perbedaan ide, cara kerja, nilai

dan perilaku; (c) **kohesif**, terciptanya hubungan yang dekat, komunikasi dua arah, kelompok sepakat tentang harapan dan perilaku kelompok serta suasana menyenangkan, dan (d) **produktif**, semua energy diarahkan untuk pencapaian tujuan kelompok. Tahap pertumbuhan kelompok (*stage of group development*) dapat dilihat pada Gambar 4 (elloppedia.blogspot.com/2010/09/kelompok-kerja.html).

11. Sistem Tenur pada Pemanfaatan Kawasan Hutan

Menurut Dassir (2010), kawasan hutan di Sub DAS Minraleng Hulu banyak dimanfaatkan sebagai lahan untuk memperoleh hijauan ternak kambing dan sapi, tempat berladang, tempat memanen lebah madu, tempat mengambil kayu bakar untuk kebutuhan rumah tangga, mengambil nira aren untuk pembuatan gula merah, dan tempat mengambil kayu untuk pagar kebun dan sawah. Tenurial pemanfaatan kawasan hutan untuk berbagai kegiatan yaitu:

- a. Sistem memanen lebah madu tenurialnya secara individu.
- b. Pengembalaan ternak sapi pada padang rumput di kawasan hutan secara dilepas ataupun sebagai lahan memungut pakan hijauan ternak.
- c. Areal berladang.
- d. Pemungutan nira aren.
- e. Pemungutan kayu bakar dan kayu pagar untuk kebun, ladang, dan sawah.
- f. Tenur sumberdaya air.

Tabel 2. Fungsi dan Lokasi Penerapan Tenur dalam Pengelolaan Lahan (Dassir, 2010)

	No	Nama Tenurial	Fungsi Tenurial	Lokasi Penerapan Tenurial
Tenurial pengelolaan lahan	1.	Ma'dumme (Ronda kelompok)	pengendalian hama babi & monyet pada kelompok peladang/petani sawah	Ladang, sawah
	2.	Massaro	- kekurangan tenaga kerja pemanen padi, kemiri, dan cengkeh) - Individu-komunal untuk subsistensi pangan antar distrik/masyarakat	Sawah, hutan kemiri dan kebun cengkeh
	3.	Ma'deppa	- kepadatan penduduk rendah	
	4.	Mallolo	- pencurian kemiri - Peremajaan kemiri - Keberlangsungan hak kepemilikan lahan	Hutan Kemiri
	5.	Pemagaran lahan	- Pembuatan pagar keliling lahan - Tanda batas areal pengelolaan	Ladang, kebun, sawah
	6.	Persiapan lahan	- Pembersihan lahan - Pengolahan tanah	Ladang, kebun, sawah

Tabel 3. Fungsi dan Lokasi Penerapan Tenur dalam Pemilikan Lahan (Dassir, 2010)

	No.	Nama Tenurial	Fungsi Tenurial	Lokasi Penerapan Tenurial
Tenurial Pemilikan Lahan	1.	Lakara/ Ta'tang	- Penanda kepemilikan - Pertambahan penduduk	- Ladang - Sawah - Kawasan hutan
	2.	Sanra (sawah)	- Distribusi lahan - Kebutuhan uang tunai pemilik lahan	- Sawah
		Sanra (kemiri)	- Distribusi lahan - Kebutuhan uang tunai pemilik lahan	- Kemiri
	3.	Teseng (sawah)	- Distribusi lahan - Patron-klien	- Sawah
	4.	Te'seng (kemiri)	- Distribusi lahan - Patron-klien	- Kemiri
	5.	Paje	- Usaha komersial - Distribusi dan intensifikasi lahan subur antar petani	- Sawah

12. Analisis Biaya dan Manfaat

Dasar utama *discount rate* adalah bahwa individu atau masyarakat yang menghargai nilai sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang akan datang dan masalah ketidakpastian terhadap peristiwa yang akan datang menyebabkan nilai sekarang lebih dihargai. Apabila biaya dan pendapatan dari tahun ke tahun selama investasi telah disesuaikan dengan nilai saat ini (present value) maka dapat diambil keputusan apakah suatu investasi ditolak atau diterima (Soemitro, 2005).

Menurut Gray dkk., (1985), analisis finansial melihat suatu proyek atau kegiatan dari sudut pandang individu pemilik, sehingga dalam menilai manfaat maupun biaya hanya dari sudut pandang individu atau swasta yang mempunyai kepentingan secara langsung dalam proyek tersebut. Suatu perhitungan dikatakan analisis ekonomi atau perhitungan sosial bila yang berkepentingan langsung dalam benefit dan biaya adalah pemerintah atau masyarakat secara keseluruhan. Nilai dari setiap barang/produk, faktor atau sumberdaya yang akan digunakan atau dihasilkan dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap kemakmuran Negara atau masyarakat.

Kelayakan finansial dan ekonomi suatu kegiatan ditunjukkan oleh nilai NPV (Net Present Value), B/C (Benefit Cost ratio) atau IRR (Internal Rate of Return). Nilai NPV, B/C dan IRR sesungguhnya saling berhubungan. Suatu kegiatan dikatakan layak secara finansial (menguntungkan bagi perusahaan) bila nilai NPV positif. Bila NPV positif artinya B/C lebih besar dari satu dan nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga diskonto (*discount rate*) yang dipergunakan dalam perhitungan nilai NPV sehingga salah satu dari ketiga nilai tersebut dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu kegiatan akan menguntungkan layak) atau tidak secara finansial (Gray dkk., 1985).

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{Bt - Ct}{(1+i)^t} \quad (1)$$

Keterangan:

B = Manfaat (Benefit)
 C = Biaya (Cost)

- t = Rotasi
 i = Tingkat suku bunga diskonto (Discount rate)

Benefit Cost ratio (B/C) adalah perbandingan antara benefit bersih dari tahun ke tahun bersangkutan yang telah di-presenvalue-kan yang bernilai negatif. Untuk menghitung indeks *B/C* terlebih dahulu dihitung $(B_t - C_t)/(1+i)^t$ untuk setiap tahun t . Dengan demikian, *B/C* merupakan perbandingan antara jumlah present value yang positif (sebagai pembilang) dengan jumlah present value yang negatif (sebagai penyebut). Kriteria ini memberikan pedoman bahwa proyek yang akan dipilih apabila $B/C > 1$. Juga sebaliknya, bila suatu proyek mempunyai $B/C < 1$, maka tidak akan dipilih. Secara umum rumus *B/C* (Gray dkk., 1985), dituliskan sebagai berikut:

$$\mathbf{B/C = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{B_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{C_t}{(1+i)^t}}} \quad (2)$$

Gray dkk., (1985) menerangkan bahwa jika ternyata *Internal Rate of Return (IRR)*, suatu proyek sama dengan i yang berlaku sebagai social discount rate, maka NPV proyek itu adalah nol. Jika IRR lebih kecil dari pada social discount rate, berarti NPV lebih kecil dari pada nol. Oleh karena itu, nilai IRR yang lebih besar atau sama dengan social discount rate menyatakan tanda 'go' untuk suatu proyek, sedang IRR kurang dari social discount rate menyatakan tanda 'no go' untuk suatu proyek. Rumus IRR dapat dituliskan sebagai berikut:

$$IRR = i + \frac{NPV'}{NPV' - NPV''} (i'' - i') \quad (3)$$

Keterangan :

- i' = Nilai percobaan pertama untuk discount rate
- i'' = Nilai percobaan kedua untuk discount rate
- NPV' = Nilai percobaan pertama untuk NPV
- NPV'' = Nilai percobaan kedua untuk NPV

Untuk menghitung pendapatan di akhir rotasi (Net Return at The End of Rotation) digunakan rumus NREER yang dituliskan sebagai berikut:

$$NREER = \sum_{j=0}^t (I_j - C_j)(1+i)^{t-j} \quad (4)$$

Keterangan :

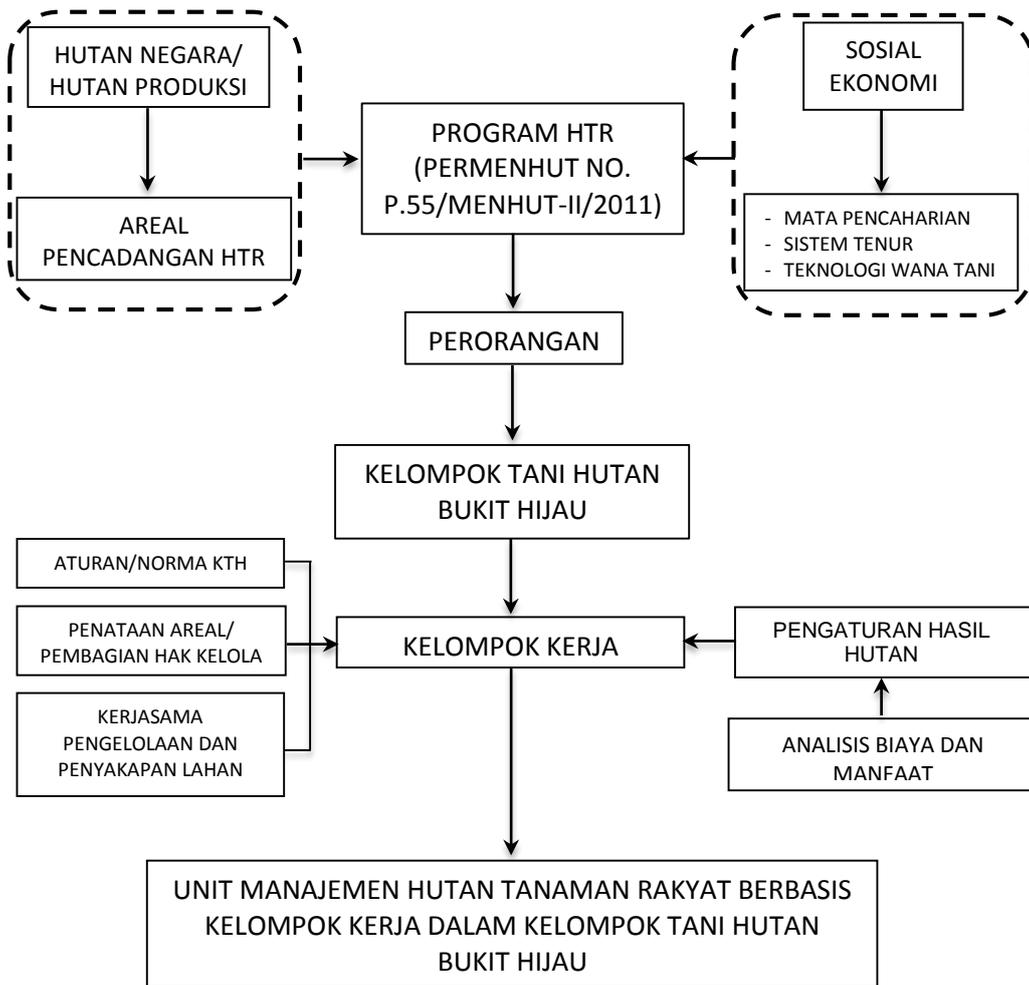
- I_j = Penerimaan pada tahun ke-j
- C_j = Pengeluaran pada tahun ke-j
- t = Rotasi
- j = Tahun Transaksi Penerimaan/Pengeluaran
- i = Suku bunga

B. Kerangka Pemikiran

Salah satu kabupaten yang telah diterbitkan IUPHHK-HTR oleh Bupati adalah Kabupaten Maros, dimana berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.372/Menhut-VI/2008 tanggal 8 Agustus 2008, penetapan pencadangan areal HTR di Kabupaten Maros seluas ± 8.580 ha, dan KTH yang telah memohon IUPHHK-HTR sebanyak 4 KTH dengan luas ± 433 ha. IUPHHK-HTR yang telah diterbitkan sebanyak 12 IUPHHK-HTR perorangan berasal dari KTH Pakkaraengan Indah di Desa Bonto Matinggi

Kecamatan Tompobulu dengan luas \pm 121 ha, sedang tiga KTH yang belum diterbitkan IUPHHK-HTR yaitu: (1) KTH Bangkit Jaya di Desa Bonto Manai Kecamatan Tompobulu; (2) KTH Tunas Harapan di Desa Cenrana Kecamatan Camba, dan (3) KTH Bukit Hijau di Desa Cenrana Kecamatan Camba (BP2HP, 2012).

Penjelasan dan data mengenai proses perizinan IUPHHK-HTR usulan KTH Bukit Hijau Dusun Holiang Desa Cenrana Kecamatan Camba Kabupaten Maros di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros, di Kantor Desa Cenrana, dan KTH Bukit Indah di Dusun Holiang, bagaimana kelembagaan dan bentuk pengelolaan HTR yang akan dilaksanakan oleh KTH jika IUPHHK-HTR diterbitkan oleh Bupati Maros, dan mengumpulkan data untuk mengetahui bentuk pengelolaan HTR yang layak diterapkan di areal HTR tersebut serta analisis biaya dan manfaat dalam pengelolaan HTR. Dalam pelaksanaan pengelolaan areal HTR, diperlukan unit manajemen HTR guna kelestarian produksi hasil hutan sesuai kesepakatan dan tujuan oleh anggota KTH. Gambaran secara rinci kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6. Kerangka Pemikiran Penelitian